

Pengaruh Variabel Makro terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar

TRIANI
YENI KUNTARI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala
Jln. Sriwijaya No. 32 & 36 Semarang 50242
email: triani12_87@yahoo.co.id

Diterima 12 Agustus 2009; Disetujui 14 Februari 2010

***Abstract** : The research was quantitative research that used secondary data namely data of physical and documentary data. Later in this study, focusing only examined financial data Karanganyar District in the period 2003-2007. Method of analysis in this study used testing conducted by testing the effects of independent variables to the dependent variable. Analysis tools used in the study was quantitative analysis. Quantitative analysis was divided into two, namely the classical assumption test and multiple linear regression test.*

***Keywords**: macro variables (GDP, population, and the inflation rate), Receiving the Regional Revenue (PAD)*

PENDAHULUAN

Dalam era kebijakan otonomi daerah, desentralisasi memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Desentralisasi adalah suatu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004). Menurut Haris (2005) tujuan utama kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban urusan domestik. Dengan demikian, diharapkan pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, daerah otonom akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.

Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Peraturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perim-

bangkan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia", merupakan landasan hukum dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD) yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan jika pemerintah memberikan pembinaan dan pedoman melalui penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Selain itu pemerintah juga menetapkan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Pemerintah pusat harus memberikan kemudahan peluang, bantuan, dan mendorong daerah otonom agar pelaksanaan otonomi daerahnya berjalan efisien dan efektif.

Untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang mantap, serta dapat mengatasi masalah kemiskinan dan kesejangan distribusi pendapatan, diperlukan upaya peningkatan kemampuan keuangan sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah otonom yang mandiri perlu mencermati faktor sumber daya manusia dan faktor dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Faktor dana ini dapat dioptimalkan dengan mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Simanjatak (dalam Halim, 2001:101), mengemukakan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibutuhkan analisis perkembangan variabel-variabel yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan.

Variabel yang dapat dikendalikan yakni variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan yang diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri. Variabel ini tidak menyediakan data kuantitatif sehingga tidak dapat diukur secara objektif pengaruhnya terhadap penerimaan PAD. Namun, variabel ini merupakan variabel pengontrol kesuksesan peningkatan PAD suatu daerah. Variabel-variabel tersebut antara lain:

1. Kondisi awal suatu daerah
2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.
3. Pengadaan pembangunan baru
4. Mencari sumber pendapatan baru
5. Perubahan peraturan
6. Penyesuaian tarif.

Selain variabel yang dapat dikendalikan, juga terdapat variabel yang tidak dapat dikendalikan. Analisis peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dinilai dengan menggunakan variabel-variabel yang tidak dapat dikendalikan yakni variabel-variabel makro ekonomi antara lain:

- a. Perkembangan PDRB per kapita riil
- b. Jumlah penduduk
- c. Tingkat inflasi

Suyanto dan Nusantoro (2008) menyatakan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan inflasi. Kontribusi masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Pendapatan Domestik Regional Bruto. PDRB berasal dari pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas, air, konstruksi, perdagangan, transpor, bank, dan lain-lain.
2. Jumlah penduduk. Penduduk dapat dianggap sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan. Penduduk yang besar merupakan pangsa pasar yang sangat potensial. sebaiknya besarnya, penduduk juga dapat menjadi faktor penghambat jika penduduk tidak mempunyai kualitas yang cukup baik sehingga menjadi beban pemerintah.
3. Tingkat inflasi. Inflasi merupakan variabel makro penting dalam formulasi kebijakan ekonomi. Beberapa manfaatnya antara lain dalam kebijakan stabilitas harga, penentuan tingkat upah, evaluasi usulan pajak, dan penyesuaian perhitungan pendapatan.

Kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Karanganyar akan lebih jelas jika menganalisis variabel makro seperti, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, inflasi. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, tingkat inflasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui tabel 1.

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat di setiap tahunnya. Kemudian pertambahan penduduknya tidak terlalu besar dan cenderung konstan setiap tahunnya, diikuti perkembangan tingkat inflasi yang berfluktuatif dengan tingkat inflasi terbesar pada tahun 2005 mencapai 14,20 %. Sementara itu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam setiap tahun selalu melebihi yang ditargetkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Karanganyar dalam keadaan yang dinamis.

Tabel 1
Pertumbuhan PDRB, Penduduk, Inflasi terhadap PAD Kabupaten Karanganyar

Tahun	PDRB(jutaan)	Penduduk	Inflasi(%)	Target PAD(ribuan)	Realisasi PAD(ribuan)
2003	1.290.163	832.203	2,51	23.665.569	25.169.918
2004	4.142.109	830.460	5,31	27.490.696	29.485.262
2005	4.188.330	838.182	14,20	31.618.494	34.302.565
2006	4.401.301	844.634	6,41	36.634.670	46.052.120
2007	4.654.054	851.366	4,09	53.050.726	56.889.064

Sumber: Kabupaten Karanganyar dalam angka 2008

Berdasarkan uraian di atas ditemukan adanya kecenderungan bahwa terjadinya peningkatan dan penambahan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) mengindikasikan pendapatan penduduk juga akan meningkat. Selanjutnya, kemampuan membayar pungutan (pajak daerah) juga akan meningkat dan diikuti dengan peningkatan penerimaan PAD. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pertanyaan apakah perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sejauh mana respon perkembangan variabel makro terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makro seperti PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi terhadap penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar.

TINJAUAN TEORETIS

Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim (2002) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

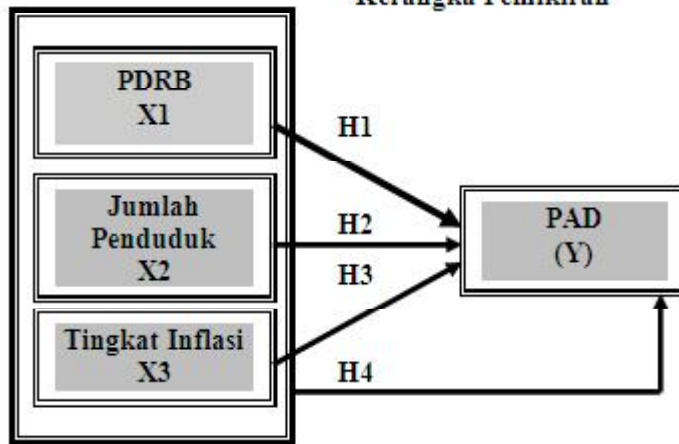
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah terbagi menjadi tiga golongan yaitu:
 1. Retribusi jasa umum
 2. Retribusi jasa usaha
 3. Retribusi perizinan tertentu
 - c. Hasil perusahaan milik daerah & hasil pengelolaan kekayaan milik daerah.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana perimbangan, terdiri dari :
 - a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU).
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Purnastuti dan Mustikawati (2007) mendefinisikan PDRB sebagai total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah regional atau propinsi selama kurun waktu satu tahun. Selanjutnya, PDRB dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Suyanto dan Nusantoro (2008:3)

ekonomi di suatu wilayah (BPS,2007).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang atau jasa dihitung menggunakan harga pada tahun sekarang dan digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun konstan dan digunakan untuk mengetahui ekonomi dari tahun ke tahun.

Penduduk. Penduduk dapat didefinisikan sebagai penghuni suatu negara yang merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara (Triwulantutik, 2006). Penduduk secara lazim dinamakan 'rakyat' dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Selanjutnya Soepomo, (dalam Triwulantutik, 2006) menyatakan bahwa penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sah yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk, dalam suatu wilayah negara ada orang lain yang bukan penduduk, misalnya wisatawan.

Inflasi. Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997), inflasi adalah kejadian apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, seperti harga beras, bahan bakar mobil naik,

tingkat upah, harga tanah, sewa barang modal juga naik. Sukirno (2004) mengemukakan definisi inflasi sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.

Selain itu inflasi juga didefinisikan sebagai suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus (Nanga, 2001). Menurut Rahardja (2004) menjelaskan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.

Review Penelitian Terdahulu. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian Suyanto dan Nusantoro (2008). Dalam penelitian tersebut data bersumber dari laporan keuangan Kota Metro, dengan studi kasus tahun 2001-2006. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PDRB, penduduk dan tingkat inflasi secara individual dan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Metro.

Kerangka Pikir. Penjelasan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Suyanto dan Nusantoro (2008). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini pengujian berkaitan dengan perkembangan variabel makro yaitu PDRB, jumlah penduduk dan tingkat inflasi terhadap penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat pada gambar 1.

Hipotesis. Hipotesis merupakan suatu anggapan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya, di mana anggapan

sementara adalah PDRB, jumlah penduduk dan inflasi akan mempengaruhi penerimaan PAD suatu daerah. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_1 : PDRB berpengaruh terhadap Penerimaan PAD
 H_2 : jumlah penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan PAD
 H_3 : inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan PAD
 H_4 : makro (PDRB, jumlah penduduk, inflasi) berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PAD.

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data fisik dan data dokumenter. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. gambaran umum Kabupaten Karanganyar.
2. penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar dari tahun 2003-2007.
3. jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar dari tahun 2003-2007.
4. perkembangan PDRB Kabupaten Karanganyar dari tahun 2003-2007
5. Perkembangan laju inflasi kabupaten Karanganyar dari tahun 2003-2007.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi JawaTengah.

Metode Pengumpulan Data. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data tertulis yaitu data PAD, PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi Kabupaten Karanganyar tahun 2003-2007 yang disusun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Jawa Tengah.

Teknik Data. Dalam penelitian ini teknik analisis yang akan dipergunakan adalah metode persamaan linier berganda atas tiga variabel bebas melalui uji "F" dan uji "t" dengan tingkat signifikan pengujian sebesar 5%. Adapun bentuk umum persamaan regresi linier berganda dengan tiga variabel bebas adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

di mana:

Y	=	Pendapatan Asli Daerah
β_0	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi
X_1	=	PDRB
X_2	=	Jumlah penduduk
X_3	=	Inflasi
ε	=	Eror

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat. Uji t digunakan untuk menentukan tingkat signifikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. sedangkan uji f digunakan untuk menentukan tingkat signifikansi pengaruh seluruh variabel dependen serta simultan terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya hubungan variabel bebas terhadap variabel yang dipengaruhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regresi Linier Berganda. Bentuk umum regresi adalah sebagai berikut:

$PAD = -0,269 PDRB + 1,195 Penduduk - 0,087 Inflasi$. Regresi faktor PDRB sebesar koefisien -0,269 menunjukkan bahwa penambahan PDRB sebesar Rp1,- akan menurunkan penerimaan PAD sebesar Rp-0,269,-. Koefisien regresi sebesar 1,195 menunjukkan bahwa penambahan penduduk 1 jiwa akan akan meningkatkan penerimaan PAD sebesar Rp1,195,-. Koefisien regresi faktor inflasi sebesar -0,087 menunjukkan bahwa penambahan tingkat inflasi 1% akan menurunkan penerimaan PAD sebesar Rp-0,087,-.

a. Uji t

1. Uji "t" untuk koefisien β_1 (PDRB) titik kritis antara -2,120 sampai 2,120 dengan t hitung sebesar -3,963. Jadi dapat disimpulkan PDRB berpengaruh terhadap PAD.
2. Uji "t" untuk koefisien β_2 (Penduduk) titik kritis antara -2,120 sampai 2,120 dengan t hitung sebesar 17,986. Jadi dapat disimpulkan Penduduk berpengaruh terhadap PAD.
3. Uji "t" untuk koefisien β_3 (inflasi) titik kritis

antara -2,120 sampai 2,120 dengan t hitung sebesar -2,186. Jadi dapat disimpulkan Inflasi berpengaruh terhadap PAD.

b. Uji F

Uji F dengan tingkat signifikansi 5% dengan titik kritis 3,2 dan F hitung sebesar 222,404 menunjukkan secara simultan variabel makro berpengaruh terhadap PAD.

2). Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,977 menunjukkan 97,7% variabel independen dapat menjelaskan model persamaan determinan PAD.

Pembahasan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi mempengaruhi PAD. Ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model yang diekspektasikan berpengaruh terhadap penerimaan PAD yaitu PDRB, jumlah penduduk, serta tingkat inflasi, ternyata ketiganya memiliki nilai signifikan terhadap penerimaan PAD.

Hasil ini sesuai dengan realita. Tingkat PDRB dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Tarigan (2005:20) menyatakan kenaikan dan penurunan dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu:

1. Kenaikan/penurunan riil, yaitu kenaikan/penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat, misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak.
2. Kenaikan/penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu meningkat.

Hal tersebut mengindikasikan peningkatan PDRB atas dasar harga konstan dapat menjadi indikator atau variabel yang mempengaruhi penerimaan PAD. Begitu pula dengan jumlah penduduk dapat dikaitkan dengan penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar. Pasalnya,

besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan juga ikut meningkat. Inflasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar, karena jika inflasi meningkat maka akan menyebabkan pendapatan terdepresiasi.

Variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap PAD mengembangkan tentang kepatuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam membayar pungutan pajak daerah dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar dalam penetapan kebijakan pembayaran pajak beserta ketetapan tarif pajaknya. perkembangan hasil perbandingan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 2.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Karanganyar selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika kita amati lebih lanjut, persentase perbandingan antara pajak dan retribusi daerah jika dibandingkan dengan penerimaan PAD setiap tahunnya justru menurun (tabel 3).

Hal itu menunjukkan bahwa persentase hasil perbandingan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar dalam mendukung penyusunan PAD dari mengalami penurunan tiap tahunnya, dan pada tahun 2007 mengalami kenaikan yang relatif kecil. Sedangkan persentase hasil perbandingan retribusi daerah di Kabupaten Karanganyar dalam mendukung penyusunan PAD mengalami penurunan tiap tahunnya.

Hasil analisis ini menjelaskan, bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar karena kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan akan tetapi PDRB selalu meningkat tiap tahunnya. Kondisi inilah yang menyebabkan variabel PDRB yang seharusnya berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD, menjadi berpengaruh negatif.

Variabel jumlah penduduk secara statistik signifikan berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD.

Tabel 2
Perbandingan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar

Tahun	Pajak	Retribusi daerah	PAD
2003	10.007.809.661	9.518.351.073	25.196.918.699
2004	11.572.405.687	10.590.885.422	29.485.262.726
2005	13.158.093.041	11.175.915.881	34.302.565.951
2006	14.543.182.743	13.820.693.294	46.052.120.123
2007	19.053.558.538	15.799.304.089	56.889.064.224

Sumber: Kabupaten dalam angka 2008

Tabel 3
Perbandingan antara Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Karanganyar

Tahun	Pajak	Retribusi daerah
2003	39,7%	37,7%
2004	39,2%	35,9%
2005	38,3%	32,6%
2006	31,6%	30%
2007	33,5%	27,7%

Sumber: Kabupaten dalam angka 2008 yang diolah

Variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD. Hasil penelitian ini sesuai dengan kejadian riil, karena semakin tinggi inflasi di suatu daerah maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

SIMPULAN

Penelitian ini kesimpulan bahwa PDRB berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Karanganyar. Inflasi berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Karanganyar.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 97,7%. Hal ini menunjukkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,977 menunjukkan 97,7% variabel

independen dapat menjelaskan model persamaan determinan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semarang: CV Duta Nusindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS. 2007. PDRB Kota Semarang Tahun 2007: Semarang.
- Cahyono, Tri. 2009. "Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD Kabupaten Karanganyar Periode 1990-2002". Solo: UPT Perpustakaan UNS. (diunduh dari <http://digilib.uns.ac.id/abstrak> pada tanggal 26 Mei 2009).
- Ghozali, Imam. 2005. Analisis Multivariate dengan

- Proses SPSS. Edisi 3. Semarang: UNDIP.
- Halim, Abdul. 2001. Menejemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, Syamsuddin. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Pres.
- Khawalaty.2000. Inflasi dan Solusinya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Listiani, Nurlia. 2006. “faktor-faktor Determinan yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Perioade 1970-2004” Jurnal ekonomi Pembangunan Vol XIV (1). Jakarta: LIPI.
- Mustofa, Zainal. 1995. Pengantar Statistik Terapan Untuk Ekonomi. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Nanga, Muana. 2001. Makro Ekonomi. Edisi Perdana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purnastuti, Losina dan Indah Mustikawati. 2007. Ekonomi untuk SMA Kelas X. Jakarta: Grasindo.
- Raharja, Prathama. 2004. Pengantar Ekonomi Makro.Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas EkonomiUI.
- Samuelson dan Nordaus. 1997. Mikro Ekonomi. Edisi ke -14. Jakarta: erlangga.
- Setiawan, E. 2005. Metodologo Peneitian Bisnis. Cetakan Pertama. Semarang: Yayasan Widya Manggala.
- Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Makro Ekonomi. Cetakan Ke limabelas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyanto dan Jawoto Nusantoro. 2008. “Pengaruh Variabel Makro terhadap Penerimaan PAD di Kota Metro”. (diunduh dari <http://yantoumn.multiply.com/jurnal>. pada tahun 2009).
- Tarigan, Robinson. 2006. Ekonomi Regional. Edisi Refisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Triwulantutik, Titik. 2006. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan Ke-2. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wardiyatmoko, K. 2006. Geografi Untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, Suseno Trianto. 1990.Indikator Ekonomi.Jakarta:Kanisius